

CERCAH HARAPAN KALA NEGARA AKUI 12 PELANGGARAN HAM

Pertama kali dalam sejarah Indonesia, presiden mengakui negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Joko Widodo mengungkap 12 kasus yang terjadi di Indonesia pada masa lalu. Diakuinya bahwa memang benar pernah terjadi pelanggaran HAM berat, mulai dari Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Talangsari, Kerusuhan Mei 1998, serta sejumlah peristiwa lain. Presiden yang akan berakhir masa jabatannya di 2024 ini berjanji memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Pemerintah juga berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Rasa haru dan secercah harapan pun mencuat dari para pegiat HAM serta korban. Pemerintah diingatkan, pernyataan ini sebenarnya sudah lama tertunda. Mengingat penderitaan para korban dibiarkan dalam kegelapan tanpa keadilan, kebenaran, dan pemulihan selama beberapa dekade. Pertanggungjawaban hukum wajib dikawal, sebab tanpa itu pengakuan tersebut dinilai tak ada artinya.

(Baca Hal 11)

Government (Hal.2)
**Kursi Pemimpin
Papua Kosong:
Lukas Enembe
Ditangkap KPK,
Wagub
Meninggal**

JOKOWI PRESIDEN MENGUPAYAKAN BEBERAPA HAL UNTUK MENJAGA HAM DI INDONESIA

- 1 Memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial
- 2 Memastikan dengan sungguh-sungguh pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi di masa yang akan datang
- 3 Memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam memulihkan hak korban

Pelanggaran HAM Masa Lalu di Indonesia yang Diakui Jokowi:

1. Peristiwa 1965-1966
2. Penembakan Misterius 1982-1985
3. Peristiwa Talangsari Lampung 1989
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1998
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
7. Peristiwa Trisakti Semanggi 1 & 2 1998-1999
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
9. Peristiwa Simpang KAA di Aceh 1999
10. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002
11. Peristiwa Wamena Papua 2003
12. Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003

Kursi Pemimpin Papua Kosong: Lukas Enembe Ditangkap KPK, Wagub Meninggal



Tersangka kasus suap, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengenakan rompi tahanan KPK dengan tangan diborgol dan menggunakan kursi roda saat dihadirkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Ketua KPK, Firli Bahuri di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023). (Foto:istimewa)

JAKARTA - Papua pun kini mengalami kekosongan pemimpin lantaran tak ada Gubernur dan Wakil Gubernur. Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Sementara kursi Wagub, Klemen Tinal yang meninggal dunia sudah tak lagi berpenghuni sejak 2014. Seperti diketahui, setelah politikus Golkar tersebut tutup usia pada 21 Mei 2021 akibat serangan jantung. Otomatis saat ini tidak ada pengambil kebijakan strategis secara praktis di Provinsi Papua.

Diketahui, DPR Papua dan pemerintah belum mencapai kesepakatan untuk menentukan satu nama Wakil Gubernur (Wagub) Papua hingga sekarang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut bahwa mereka bakal mencermati proses dan tindakan hukum terhadap Lukas Enembe yang saat ini dilakukan KPK.

"Sehingga tidak akan sampai mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Papua," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan ketika Rabu (11/1/2023).

Benni mengatakan, langkah lanjutan pemerintah akan bergantung pada kepastian status Lukas Enembe setelah ditangkap KPK. "Status inilah nantinya yang akan menjadi dasar dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pembinaan dan pengawasan kepada Pemda Papua lebih lanjut," ujarnya.

Sementara itu, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala daerah diberhentikan sementara dari

jabatannya apabila menjadi terdakwa tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang diancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara.

Lukas Diduga Kantongi Rp 11 M

Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) diduga menerima suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Total suap dan gratifikasi yang diterima Lukas diduga senilai Rp 11 miliar, jumlah tersebut rinciannya Rp 1 miliar diduga suap. Sisanya, yakni Rp 10 miliar, total gratifikasi.

"Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga menerima uang dari tersangka RL (penyuap) sebesar Rp 1 miliar," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat konpers di RSPAD Gatot Subroto, Rabu (11/1/2023).

KPK juga telah memblokir

rekening senilai Rp76,2 miliar dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe. "KPK telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp76,2 miliar," kata Firli Bahuri.

Tim penyidik, kata Firli, telah mengeledah di enam lokasi, yakni Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik turut menyita aset, di antaranya emas batangan, perhiasan emas, dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar Rp4,5 miliar. Selain itu, tim penyidik sampai saat ini telah memeriksa 76 saksi dalam penyidikan kasus Lukas Enembe.

Selain itu, Lukas diduga menerima gratifikasi. Pemberian gratifikasi ini diduga berhubungan dengan jabatannya sebagai orang nomor satu di Papua.

"Tersangka LE diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp 10 miliar," katanya.

KPK mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami informasi dan data, termasuk aliran uang yang diduga diterima LE. Selain itu, KPK masih menghitung dugaan perubahan bentuk ke dalam beberapa aset yang bernilai ekonomis.

Lukas Enembe disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait penahanan, Gubernur Papua Lukas Enembe ditahan oleh KPK untuk 20 hari pertama. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Papua. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, sejatinya Lukas Enembe ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Namun karena alasan kesehatan, dia

dibantarkan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

"Mempertimbangkan keadaan kondisi Tersangka LE maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara untuk kepentingan perawatan sementara di RSPAD sejak hari ini sampai kondisi yang membaik," kata Firli.

Dalam konferensi pers, Firli ditemani oleh Kepala RSPAD Letnan Jenderal TNI Albertus Budi Sulistya; Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian PB IDI dr Pujo Hartono; dan serta sejumlah dokter.

Di RSPAD, Lukas sudah menjalani sejumlah pemeriksaan. Meliputi fisik tanda vital, laboratorium, dan jantung. "Pendapat dari dokter menyimpulkan tersangka LE diperlukan perawatan sementara," ujar Firli. Saat ini Lukas Enembe dirawat di Paviliun Kartika RSPAD.

Meski demikian, kondisi kesehatan Lukas lebih membaik ketimbang kemarin malam. Tim dokter RSPAD juga menyebut, Lukas telah dalam kondisi stabil.

"Yang jelas ada dokter penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, dokter jantung, dan juga dokter syaraf. Minimal itu," kata Kepala RSPAD Gatot Subroto, dr. A. Budi Sulistya, Rabu (11/1/2023). Meski demikian, Budi enggan merinci penyakit apa yang tengah diidap Lukas. Menurut dia, hal itu menjadi bagian dari rahasia medis yang tidak bisa dibuka dalam forum. "Itu kan rahasia medik jadi kami tidak bisa membuka di forum ini," sambung dia.

Saat dihadirkan sebagai tersangka, Lukas Enembe duduk di kursi roda. Dia mengenakan pakaian pasien rumah sakit, serta rompi oranye tahanan KPK dengan tangan terborgol. Setelah ditangkap di Papua pada Selasa (10/1/2023) kemarin, Lukas langsung diterbangkan ke Jakarta. Dia langsung dibawa ke RSPAD untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Lukas Enembe akhirnya ditangkap setelah menjadi tersangka pada September 2022. Sebelumnya, dia Dia tak kunjung ditahan karena alasan kesehatan dan keamanan di Papua. (wid,rls,ant/dya)

13,6 miliar

**KEKAYAAN
LUKAS ENEMBE
MENURUT LHKPN
(2021)**

932,5 juta

Tanah dan bangunan

Transportasi dan mesin

0

Harta bergerak lainnya

1,3 miliar

Surat berharga

18 miliar

PAKET PROYEK DI TAHUN ANGGARAN 2019-2021 DIDUGA TERKAIT KORUPSI LUKAS ENEMBE

1. Proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14,8 miliar
2. Proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar
3. Proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar

0

Harta lainnya

0

Utang

Kas dan setara kas

DPR Tolak KPU Mengatur Dapil, Politikus PDIP: MK Bubarkan Saja

JAKARTA - Komisi II DPR RI menolak penetapan daerah pemilihan (dapil) legislatif DPR RI dan DPRD provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022. Bahkan anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDI-P Cornelis meminta lembaga yang saat ini dipimpin Anwar Usman itu dibubarkan.

"Mahkamah Konstitusi kita bubarkan saja," ucap Cornelis yang langsung disambut tawa para anggota Komisi II dalam Rapat Kerja dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP RI, Rabu (11/1/2023).

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menyebutkan bahwa perubahan aturan tersebut tidak adil karena mereka mengaku tidak dilibatkan dalam persidangan di MK. "Soal dapil, kami sudah rapat internal. Kami sudah sepakati bahwa untuk dapil DPR dan DPRD provinsi sikap kami adalah tidak ada perubahan, sama dengan Lampiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017," katanya. Dalam rapat ini, pembahasan soal penataan dapil ini diungkit Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Doli menegaskan bila seandainya ada rapat konsinyering antara mereka dengan KPU RI, mereka akan berpandangan bahwa KPU RI tetap hanya berwenang menata dapil untuk pileg DPRD tingkat kota dan kabupaten sebagaimana selama ini. "Jadi itu saya perlu sampaikan mewakili teman-teman yang sudah mengambil keputusan, kemarin dan silakan nanti kita bahas. Itu beberapa hal catatan yang perlu saya sampaikan di awal menjadi kesepakatan kita sebelumnya," tambah politikus Golkar itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menganggap putusan MK tidak memberi perintah bagi KPU RI menata dapil DPR RI dan DPRD provinsi. "Saya sudah bolak-balik putusan nomor 80. Itu tidak ada perintah supaya KPU melakukan penataan dapil. Yang diberikan kewenangan, Pak, bukan perintah. Putusan MK 80 itu tidak memerintahkan. Coba dibaca, Pak," kata politikus PDI-P itu dalam forum yang sama. "Tidak setiap keputusan harus dilakukan. Bisa dilakukan, bisa tidak, kecuali diperintahkan," ia menambahkan.

Junimart juga mengungkit bahwa anggaran KPU RI untuk tahun 2023 tidak disetujui sebanyak usulan. Ia meminta penyelenggara pemilu "tidak menambah kerja-kerja baru" karena anggaran dinilai tidak cukup. Baca juga: Parpol Diprediksi Akan Berupaya Intervensi KPU untuk Cawe-cawe Penentuan Dapil

Sejauh ini, KPU RI telah melakukan beberapa kali rapat dengan tim ahli serta jajaran di tingkat provinsi dan kota/kabupaten soal desain dapil DPR RI dan DPRD provinsi, merespons

putusan MK. Sebelumnya, MK mencabut kewenangan DPR RI untuk menentukan daerah pemilihan (dapil) anggota legislatif DPR RI dan DPRD RI. Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Selasa (20/12/2022) atas permohonan yang sebelumnya dilayangkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Dalam putusan itu, MK menyerahkan kewenangan penetapan dapil DPR RI dan DPRD provinsi ke tangan KPU RI. Sebelumnya, kewenangan ini dikunci dalam Lampiran III dan IV Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di beleid itu, DPR RI sudah menentukan dapil pileg DPR RI dan DPRD provinsi, sedangkan KPU RI hanya berhak menentukan dapil pileg DPRD kota dan kabupaten. MK memutuskan, Pasal 187 ayat (5) tentang pendapilan DPR RI dan 189 ayat (5) UU Pemilu tentang pendapilan DPRD provinsi bertentangan dengan UUD 1945.

8 Fraksi Jadi Pihak Terkait Gugatan Sistem Pemilu

Delapan fraksi di DPR, terkecuali Fraksi PDI-P, sepakat jadi pihak terkait atau pemohon intervensi atas gugatan judicial review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun langkah ini diambil dalam rangka memegang sikap agar sistem pemilu proporsional terbuka tetap dipertahankan.

Delapan fraksi DPR ini mengaku siap untuk diikutsertakan dalam sidang terkait hal tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK). "Sehingga, nanti pada saat sidang-sidang kami juga masing-masing akan diikutkan," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang mewakili Fraksi Golkar DPR dalam konferensi pers di Gedung DPR, Rabu (11/1/2023).

Doli menegaskan, delapan fraksi ini menyepakati dan menyetujui tetap berada pada posisi menerapkan sistem proporsional terbuka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Selain itu, disepakati pula bahwa suara yang disampaikan delapan fraksi dalam sidang di MK mendatang adalah suara mayoritas DPR. "Karena sekarang ranahnya ada di Mahkamah Konstitusi, maka kemudian DPR sebagai pihak yang tentu akan diminta penjelasan pada setiap kasus atau perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi itu harus memberikan penjelasan," imbuh Doli.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan, konferensi pers ini dihadirkan oleh pimpinan delapan fraksi DPR. Mereka adalah Ketua Fraksi Golkar DPR Kahar Muzakir, kemudian Ketua Fraksi Ahmad Muzani dan anggota Fraksi Gerindra dari Komisi II Prasetyo. Serta, Sekretaris Fraksi Saan Mustopo.



Komisi II DPR menggelar raker bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja serta Ketua DKPP Heddy Lugito membahas tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 Rabu (11/1/2023). (Foto:TVP)

Selanjutnya, yang mewakili Fraksi PKB adalah Fathan dan Yanuar Prihatin, Fraksi Demokrat diwakili oleh Marwan Cik Hasan, serta Fraksi PKS diwakili oleh Soekanto. Serta, Fraksi PAN yang diwakili oleh Eko Patrio dan Guspari Gaus. Terakhir, perwakilan Fraksi PPP yaitu Ketua Fraksi Amir Uskara dan Sekretaris Fraksi Achmad Baidowie. (wid,rls, ist/dya)

BEBERAPA DAPIL PEMILU TAHUN 2019

JAWA BARAT

Jawa Barat I
Kota Bandung, Kota Cimahi

Jawa Barat II
Bandung, Bandung Barat

Jawa Barat III
Cianjur, Kota Bogor

Jawa Barat IV
Sukabumi, Kota Sukabumi

Jawa Barat V
Bogor

Jawa Barat VI
Kota Bekasi, Kota Depok

Jawa Barat VII
Bekasi, Karawang, Purwakarta

Jawa Barat VIII
Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon

Jawa Barat IX
Majalengka, Subang, Sumedang

Jawa Barat X
Ciamis, Kuningan, Pangandaran, Kota Banjar

Jawa Barat XI
Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya

JAWA TENGAH

Jawa Tengah I
Kendal, Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang

Jawa Tengah II
Kudus, Demak, Jepara

Jawa Tengah III
Blora, Grobogan, Pati, Rembang

Jawa Tengah IV
Karanganyar, Sragen, Wonogiri

Jawa Tengah V
Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Kota Surakarta

Jawa Tengah VI
Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kota Magelang

Jawa Tengah VII
Banjarnegara, Kebumen, Purbalingga

Jawa Tengah VIII
Banyumas, Cilacap

Jawa Tengah IX
Brebes, Tegal, Kota Tegal

Jawa Tengah X
Batang, Pekalongan, Pemalang, Kota Pekalongan

JAWA TIMUR

Jawa Timur I
Sidoarjo, Kota Surabaya

Jawa Timur II
Pasuruan, Probolinggo, Kota Probolinggo

Jawa Timur III
Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo

Jawa Timur IV
Lumajang, Jember

Jawa Timur V
Malang, Kota Batu, Kota Malang

Jawa Timur VI
Blitar, Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri

Jawa Timur VII
Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek

Jawa Timur VIII
Jombang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Kota Madiun, Kota Mojokerto

Jawa Timur IX
Bojonegoro dan Tuban

Jawa Timur X
Gresik, Lamongan

Jawa Timur XI
Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep

Perusahaan Sepatu Tawarkan 1.600 Karyawan Mengundurkan Diri

SERANG - Kabar kurang sedap kembali terjadi pada para pekerja yang ada di perusahaan sepatu. Meski tidak mau disebut sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun produsen sepatu olah raga PT Nikomas Gemilang yang menawarkan pengunduran diri sukarela kepada 1.600 orang pekerjanya.

Anggota Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Anton Supit, membenarkan kabar tersebut. Ia juga memastikan bahwa yang terjadi bukanlah berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak.

"Yang perlu diluruskan, perusahaan itu menawarkan pengunduran secara sukarela. Kalau PHK, mau tidak mau, karyawan itu harus terima diputus hubungan kerja," kata Anton di konfirmasi Tempo, Rabu (11/1/2023).

Anton mengatakan, PT Nikomas Gemilang menawarkan pengunduran diri kepada karyawannya dengan tanpa paksaan. "Memang agak mirip dengan PHK. Tapi dengan penawaran ini, kalau karyawan tidak ingin (mundur), ya tidak ada paksaan," ucapnya.

Lebih jauh Anton membeberkan alasan di balik perusahaan menawarkan karyawannya mundur dari pekerjaannya. Hal ini tak lepas dari perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor dan kini tengah mengalami kemerosotan permintaan.

"Sejak pertengahan tahun lalu sudah ada sinyal permintaan pasar dunia itu khususnya Amerika dan Uni Eropa itu menurun drastis," kata Anton.

Tak tanggung-tanggung, penurunan permintaan pasar itu bahkan bisa mencapai rata-rata 50 persen. "Kenapa rata-rata, karena tidak semua pabrik, ada yang tidak sampai bahkan ada yang lebih dari 50 persen," tutur Anton.

Permintaan yang anjlok itu bukan hanya untuk produk sepatu, tapi juga produk garmen yang mengalami penurunan pesanan hingga 30 persen. Begitu juga produk furnitur yang tak luput penurunan permintaan.

"Termasuk karet, permintaan ekspor karet kita menurun, dan banyak lagi sektor yang mengalami penurunan permintaan," kata Anton.

Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, menyebutkan telah terjadi PHK oleh sejumlah pabrik sepatu di Tanah Air. Sebanyak 25.700 karyawan yang dilepas oleh kalangan industri.

Eddy menjelaskan keputusan PHK terpaksa diambil karena jebloknya pesanan dari sejumlah produsen sepatu terbesar dari luar negeri belakangan ini.

Dia mencontohkan tiga merek

internasional seperti Nike, Reebok dan Adidas tercatat telah memangkas pesanan hingga 50 persen dari kondisi normal karena perusahaan tersebut mengalami kesulitan penjualan.

"Di dalam pertemuan kita dengan orang Nike, Reebok, dan Adidas, mereka mengatakan 30 tahun mereka bisnis, tidak pernah sekalipun mengalami kesulitan penjualan kecuali tahun ini," kata Eddy Rabu (16/11/2022) lalu.

Hal tersebut yang kemudian memukul industri persepatuan di dalam negeri. Pasalnya, ketergantungan industri Tanah Air atas pesanan ekspor dari sejumlah perusahaan itu sangat besar.

Selama 30 berbisnis, kata Eddy, merek-merek sepatu tersebut tidak pernah mengurangi pesanan hingga di bawah 10 persen. Bahkan setiap tahun, ketiga merek itu kerap menaikkan pesanan hingga 10 sampai 30 persen.

Eddy juga menceritakan panjang lebar soal pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan sejumlah pabrik sepatu di Tanah Air. Tercatat sudah 25.700 karyawan yang dilepas oleh kalangan industri.

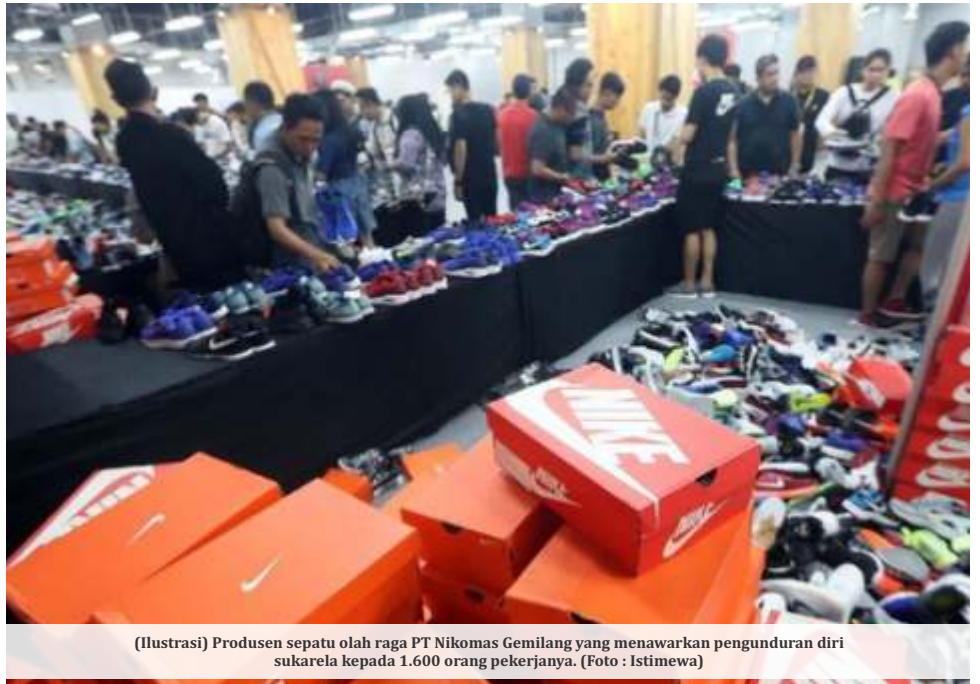
Eddy menjelaskan keputusan PHK terpaksa diambil karena jebloknya pesanan dari sejumlah produsen sepatu terbesar dari luar negeri belakangan ini.

Ia mencontohkan tiga merek internasional seperti Nike, Reebok dan Adidas tercatat telah memangkas pesanan hingga 50 persen dari kondisi normal karena perusahaan tersebut mengalami kesulitan penjualan.

Karena memangkas pesanan itu, Aprisindo mendapat laporan telah terjadi PHK terhadap dua puluh ribu karyawan. Angka tersebut diperkirakan bakal semakin besar, kata Eddy, karena baru merepresentasikan 10 persen dari total karyawan yang terancam di-PHK.

Lebih jauh, Eddy menyebutkan pemangkas jumlah karyawan juga terjadi di negara-negara pengeksport alas kaki lainnya seperti Vietnam dan Cina. Dua negara tersebut bahkan mengajukan kepada pemerintahnya agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja dari 40 jam kerja per minggu menjadi 25 sampai 30 jam.

Hal serupa, menurut Eddy, juga sebetulnya diharapkan bisa dilakukan di Tanah Air. Sejumlah perusahaan berharap pemerintah memberikan kelonggaran agar bisa hanya menggaji karyawannya berdasarkan pro rata



(Ilustrasi) Produsen sepatu olah raga PT Nikomas Gemilang yang menawarkan pengunduran diri sukarela kepada 1.600 orang pekerjanya. (Foto : Istimewa)

jam kerja.

"Kalau bahasa medianya itu, no work no pay. Tapi sebetulnya bukan itu. Kita ingin meminta satu kelonggaran pada masa ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya kita tidak melakukan PHK," kata Eddy.

Eddy menyebutkan hal tersebut bisa jadi jalan keluar yang tak mungkin dihindari. Sebab, karyawan saat ini tidak bekerja dengan penuh atau hanya bekerja setengah hari atau 70 persen dari biasanya karena total order yang tidak mencukupi.

Di sisi lain, ia mengungkapkan tak ingin terus menerus melakukan PHK. Karena, jika nanti keadaan mulai pulih dan perusahaan membutuhkan karyawan kembali, perusahaan memerlukan upaya lebih besar untuk merekrut orang baru. "Perlu semacam upaya seperti kita merekrut karyawan baru, yang harus memberikan pelatihan dan sebagainya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat mengungkapkan usulan 'no work no pay' itu menunjukkan bahwa kelompok pengusaha hari ini semakin rakus dan hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. "Menyakiti hati buruh dan minim empati pada kondisi buruh," ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu, 12 November 2022.

Aspek pun menyanggah pernyataan asosiasi pengusaha yang berdalih bahwa aturan no work no pay diperlukan untuk mencegah terjadinya PHK. Dalih itu, kata Mirah, hanya omong kosong dan dibuat-buat dan alasan untuk melepaskan dari tanggung jawab membayar hak-hak

pekerja atau buruh. "Karena sebetulnya mereka tidak mau bertanggung jawab untuk mensejahterakan pekerja/buruhnya sendiri," kata Mirah. (lut/tempo/dya)



Kalau bahasa medianya itu, no work no pay. Tapi sebetulnya bukan itu. Kita ingin meminta satu kelonggaran pada masa ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya kita tidak melakukan PHK,"

EDDY WIDJANARKO,
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo),



Perekonomian Indonesia Mulai Tumbuh

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai nampak pasca pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari beberapa hal diantaranya adalah nilai ekspor. Pada 2022, nilai ekspor Indonesia tumbuh 29,4 persen dengan nilai US\$ 268 miliar atau sekitar Rp 4.144 triliun. Beberapa komoditas, seperti besi baja, bahan bakar fosil, dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) berkontribusi dalam peningkatan tersebut.

"Batu bara bisa mengompensasi impor daripada minyak, sehingga di bidang energi ini positif sebesar hampir US\$ 6,8 miliar secara year to date. Sedangkan iron and steel US\$ 29 miliar, dan CPO sekitar US\$ 30 miliar. Tentu ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia relatif kuat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekspor pada 2023 akan tetap tumbuh positif meski lebih melambat daripada tahun lalu. Menurut Airlangga, pemerintah memproyeksikan nilai ekspor naik di 12,8 persen dan nilai impor di 14,9 persen.



Tahun 2022 ekspor tumbuh 29,4 persen, impor tumbuh 25,37 persen. Tahun depan (2023) diproyeksikan, karena kita basisnya sudah tinggi, ekspornya naik di 12,8 (persen), impornya 14,9 persen,"

AIRLANGGA HARTARTO
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



"Tahun 2022 ekspor tumbuh 29,4 persen, impor tumbuh 25,37 persen. Tahun depan (2023) diproyeksikan, karena kita basisnya sudah tinggi, ekspornya naik di 12,8 (persen), impornya 14,9 persen," ungkap Airlangga.

Dalam rapat terbatas, menurut Airlangga, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya agar pertumbuhan nilai ekspor yang positif ini juga diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Presiden juga meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dapat diperbaiki.

"Saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang diwajibkan masuk dalam negeri. Nah ini kita akan masukkan juga beberapa sektor, termasuk sektor manufaktur. Kita akan melakukan revisi (PP Nomor 1 Tahun 2019), sehingga tentu kita berharap peningkatan ekspor dan juga surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan dari cadangan devisa," papar Airlangga.

Sementara, soal negara tujuan ekspor, Airlangga mengatakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih menjadi negara dengan pangsa pasar yang tertinggi. Perdagangan antarnegara anggota ASEAN (Intra-ASEAN Trade) juga masih cukup tinggi.

"Ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk memperkuat pangsa pasar Indonesia di negara ASEAN dan berketetapan dengan Bapak Presiden memegang keketuaan ASEAN. Jadi ini menjadi prioritas yang diarahkan Bapak Presiden," tuturnya.

Sementara itu, secara terpisah Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyebut Indonesia berencana mengekspor jagung ke Vietnam, Filipina, dan Malaysia pada tahun ini. Bapanas akan mengekspor sebanyak 200 ribu ton dalam tiga bulan pertama ketika ekspor dimulai.

"Pada tiga bulan pertama sebanyak 200 ribu ton," ujar Arief saat ditemui di Kantor Foodbank of Indonesia, Jakarta Selatan pada Selasa (10/1/2023).

Arief mengatakan dirinya telah menemui para duta besar dari negara-negara tujuan ekspor tersebut untuk membahas rencana ini. Namun, dia mengaku masih ada sejumlah kendala yang dihadapi Bapanas. Antara lain penyediaan teknologi angkut yang berfungsi untuk memindahkan jagung dari satu kapal ke kapal lainnya. Untuk membangun teknologi tersebut, pemerintah menggelontorkan dana investasi sebesar Rp 2 triliun.

"Dengan menggunakan teknologi berbentuk belalai. Jadi belainya akan memindahkan jagung dari kapal ke kapal. Tidak seperti sekarang pakai



(Ilustrasi) Perekonomian Indonesia mulai mengalami pertumbuhan pasca Covid-19

terpal, pakai jaring," ucap Arief.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan arahan untuk meningkatkan produktivitas jagung. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pembukaan lahan di area baru dan penggunaan benih unggul.

Arahan Presiden Jokowi itu berdasarkan pertimbangan tingginya potensi komoditas jagung. Berdasarkan data USDA Tahun 2022, tercatat produksi jagung Indonesia mencapai 34,4 juta ton. Pemerintah juga berencana melakukan efisiensi di seluruh lini kegiatan dalam rantai pasok jagung, mulai dari proses panen, penanganan pascapanen, penyimpanan, hingga proses transportasi dan distribusi. Efisiensi dilakukan dengan menerapkan inovasi dan teknologi pertanian, salah satunya seperti penggunaan teknologi digital dalam precision agriculture.

Menurut Airlangga, potensi hilirisasi industri pengolahan jagung sangat tinggi untuk produksi makanan olahan seperti pati jagung, bihun jagung, corn grits, tepung jagung, pemanis dan makanan ringan. Ia mengatakan Indonesia akan melakukan ekspansi industri pengolahan jagung di sejumlah wilayah, serta penyesuaian spesifikasi bahan baku jagung antara produksi dalam negeri dengan kebutuhan industri.

Sementara hal berbeda disampaikan Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Leo Putera Rinaldy memperkirakan ekonomi nasional tumbuh sebesar 4,9 persen secara tahunan pada 2023 ditopang oleh konsumsi masyarakat.

"Pertumbuhan Indonesia akan melambat tapi manageable, yakni

tumbuh di 4,9 persen secara tahunan. Pelemahan terjadi karena pelemahan ekspor dan perlambatan investasi," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Ia memperkirakan ekspor menurun akibat normalisasi harga komoditas, sementara investasi melambat karena peningkatan suku bunga acuan bank sentral.

Konsumsi masyarakat diprediksi akan tumbuh 4 sampai 6 persen secara tahunan karena penyelenggaraan pemilihan umum serentak, inflasi yang merendah, dan pertumbuhan pendapatan riil masyarakat.

Ia memperkirakan kampanye untuk pemilihan umum serentak akan menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 0,6 sampai 1,3 persen. Adapun anggaran untuk pemilu tersebut diperkirakan disalurkan secara terkonsentrasi pada semester II 2022.

Sementara itu, inflasi pada Desember 2022 yang mencapai 5,5 persen secara tahunan diperkirakan telah mencapai puncak sehingga di 2023 inflasi akan turun dan mencapai 4 persen mulai kuartal III 2023.

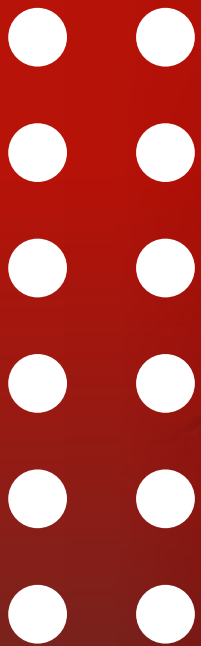
Inflasi diproyeksi akan menurun di 2023 menjadi sebesar 3,8 persen karena kebijakan pemerintah mensubsidi sebagian biaya logistik untuk bahan pangan strategis yang diperkirakan akan berlanjut pada 2023. "Harga pangan di 2023 juga terkendali dibantu oleh kondisi cuaca yang lebih normal dan netral," imbuhnya.

Selain inflasi, konsumsi masyarakat juga akan tetap tumbuh ditopang oleh pertumbuhan pendapatan secara riil yang mencapai 7,16 persen. "Ini penting untuk mendukung daya beli masyarakat. Apalagi pada saat yang sama, angka pengangguran juga terus menurun," ucapnya. (lut,tempo/dya)

Inspirasi Busana Lawas

AIMEE SARAS

Foto - Foto : Berbagai Sumber



TERKENAL dengan penampilan busana yang lawas, Aimee Saras mengaku mendapatkan inspirasi dari gaya berpakaian sang ibu.

"Kalau ngelihat fotonya dari dulu atau sampai sekarang pun kadang masih suka mau aku ikutin. Bajunya kadang suka aku ambilin juga. Kadang aku suka ngoprek lemari mama. Thanks mama," ujar Aimee saat dijumpai di Wisma Antara, Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Aimee, fesyen sendiri akan kembali ke era jaman dahulu. Namun baginya, cara berpakaian yang paling penting adalah saat seseorang merasa nyaman ketika menggunakannya.

"Sebenarnya fashion kayak recycle saja sih. Kembali lagi. Tapi menurut aku yang penting bikin nyaman saja sih. Mau modern atau lawas apapun itu. Kebetulan kalo panggilan aku yang lawas-lawas terus ya. Kembali ke masa lalu," kata Aimee.

Kecintaan Aimee terhadap gaya vintage sendiri berawal dari potret masa lalu ibunya. Saat itu, ia melihat gaya rambut dan busana sang ibu sangat keren dan menarik.

"Salah satunya aku pernah melihat gaya mama aku. Waktu itu berawal mula dari gaya rambut. Kayaknya waktu itu ada kesalahpahaman ketika mamaku ke salon mau rambutnya di sanggul," ungkap Aimee.

"Ternyata sanggulnya kok ala-ala 1950an. Aku bilang kok keren banget. Ketika lihat cara pakaian mamaku juga, aku iseng-iseng saja nyoba. Misal jas ala-ala 40an, kok aku merasa lebih nyaman ya?" imbuhnya.

Selain karena sang ibu, Aimee juga mulai menyukai gaya vintage saat berada di New York, Amerika Serikat. Saat itu, karena tak memiliki banyak uang, Aimee sempat berburu pakaian ke toko lawas. Dia pun akhirnya semakin menyukai gaya berpakaian yang lawas dan mengenakannya hingga kini.

"Waktu aku di New York itu sering berburu tempat-tempat lawas. Dulu sebagai murid kan kita nggak banyak uangnya. Jadi menurutku baju itu juga memberi-kan kita banyak sejarah dan berasa kalau kita pake kita berasa balik ke masa lalu," terang Aimee.

"Kayaknya karena ketertarikan aku sama sejarah juga, karena mamaku dan karena dulu aku berusaha untuk berhemat di sana, jadi ya yang bisa aku beli saja," tutupnya.

Aimee Saras lahir pada 14 Agustus 1983, yang berarti kini ia berumur 39 tahun. Agama yang Aimee Saras anut adalah agama Islam. Bersama sang suami, Tony Merle, Aimee Saras membentuk duo grup Jazz yang bernama The Spouse.

Selain berprofesi sebagai penyanyi jazz, Aimee Saras juga berprofesi sebagai aktris, dan baru-baru ini ia mendapatkan peran Dina di web series Turn On.

Ketika berkuliah di Amerika Serikat, Aimee Saras memulai karirnya sebagai pemain teater musikal off-Broadway Miss Saigon di New York.

Aimee Saras diketahui memiliki hobi dengan fashion, dimana di postingan Instagramnya, Aimee Saras kerap mengunggah foto dirinya dengan fashion yang berbeda-beda.

Nama lengkap:

Dyah Rahmi Saraswati

Nama panggilan:

Aimee Saras

Nama panggung:

Aimee Saras

Kota asal:

Jakarta

Tanggal lahir:

14 Agustus 1983

Umur:

38 tahun

Agama:

Islam

Status:

Menikah

Pasangan:

Tony Merle

Pendidikan :

University of New York

Pekerjaan:

Penyanyi Jazz, Aktris

Hobi:

Fashion, Menyanyi

Akun Instagram:

@aimeesaras



BERBAHAYA

BANGET

MAKAN MI

DICAMPUR

NASI

BELUM lama ini, informasi soal bahaya makan mi dicampur nasi viral di media sosial Twitter. Sebenarnya, benarkah makan mi pakai nasi itu berbahaya?

Ahli gizi dr Tan Shot Yen, menjelaskan rupanya, makan mi pakai nasi bisa menyebabkan dampak buruk untuk kesehatan kita.

Diketahui, mi merupakan produk ultra porses yang berisiko menggantikan pangan utuh dengan karbohidrat yang lebih baik.

Oleh sebab itu, jika mi dicampur dengan nasi maka akan menjadi double karbohidrat.

"Kedua sumber karbohidrat ya, bahkan mi terbuat dari tepung rafinasi terigu yang glikemik indeksnya tinggi, mudah membuat lonjakan gula darah," ujar Tan.

Tan menjelaskan, karbohidrat rafinasi bukanlah pangan utuh.

Hal ini menyebabkan konsumsinya dapat membuat lonjakan gula darah sehingga berpotensi meningkatkan risiko diabetes.

Kata Tan, karbohidrat rafinasi ini berbeda dengan beras pecah kulit, beras merah, beras coklat atau beras hitam. Di mana kulit arinya masih utuh sehingga lambat dicerna menjadi gula.

Selain itu, Tan juga mengatakan bahwa seluruh karbohidrat rafinasi berisiko menyebabkan penyakit jantung serta pembuluh darah. Tapi, risiko itu juga disebabkan oleh gaya hidup yang tidak baik.

"Jadi bukan gara-gara makan mi saja (penyebab gangguan pembuluh arah dan jantung), tapi keseluruhan gaya hidup," jelasnya.

Begitu pula dengan penjelasan dari ahli gizi dari UGM Harry Freitlag Luglio Muhammad.

Terkait apakah konsumsi mi bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah dan jantung, Harry menilai tidak semua mi berbahaya.

"Yang bahaya adalah sering mengonsumsi mi instan yang berkadar garam tinggi," ujarnya.

"Jadi yang buat masalah penyakit

jantung dan pembuluh darah bukan karena 'mi' nya tapi karena garam yang ada pada mi instan," tambah Harry.

Ia pun menyarankan agar kita memilih mi yang rendah garam. "Sekarang sudah banyak pilihannya. Di label kemasan biasanya ada panduan berdasarkan nilai natrium pada mi instan," jelas Harry.

Di sisi lain, Harry juga menjelaskan bahwa makan nasi pakai nasi bisa membuat konsumsi gizi yang tak seimbang.

"Nasi sumber karbohidrat dan mi sumber karbohidrat. Jadi kurang zat gizi lain seperti protein lemak baik, vitamin, dan mineral," ucapnya.

Sehingga, kita perlu menambahkan santapan lain seperti sayur dan lauk untuk melengkapi asupan gizi. Kalau untuk lauk, tidak perlu daging. Kita bisa memakan telur, tahu, atau tempe.

Simaklah berbagai bahaya makan mi instan dengan nasi yang perlu diwaspadai berikut ini.

1. Karbohidrat berlebihan

Saat Anda mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat, Anda dapat merasa sangat kenyang dan tidak ingin makan lagi.

Perasaan kenyang berlebihan ini membuat kebutuhan nutrisi lainnya yang diperlukan tubuh Anda menjadi sulit untuk dipenuhi.

2. Mengganggu pancreas

Mengonsumsi karbohidrat berlebihan dapat mengganggu fungsi organ pancreas. Organ yang memproduksi hormon insulin ini perlu bekerja lebih keras saat tubuh mengonsumsi terlalu banyak gula dan karbohidrat.

Lambat laun, fungsi pankreas dapat terganggu dan mengalami kerusakan jika Anda masih sering makan mie pakai nasi.

3. Risiko diabetes

Bahaya makan mie instan dengan nasi selanjutnya adalah meningkatkan risiko diabetes. Seperti penjelasan sebelumnya, organ pankreas perlu bekerja lebih keras untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa dengan bantuan insulin.

Jika situasi ini terus dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, pankreas dapat mengalami kerusakan dan menyebabkan diabetes.

4. Merusak organ hati

Karbohidrat berlebih di dalam tubuh dapat diubah menjadi zat lainnya. Contohnya, jika tubuh Anda kekurangan lemak, tubuh dapat mengubah karbohidrat menjadi lemak.

Nantinya, pemrosesan lemak ini dapat dipindahkan ke organ hati sebagai sistem pendukung untuk metabolisme pencernaan. (berbagai sumber)





SAMSUNG

PERBANYAK

PONSEL HASIL

DAUR ULANG

SAMSUNG Electronics berkomitmen akan lebih banyak ponsel dan produk lainnya yang menggunakan bahan daur ulang.

"Kami berencana untuk meningkatkan sirkularitas sumber daya produk elektronik kami di sepanjang siklus hidup produk," kata Presiden dan CEO Samsung Electronics Asia Tenggara dan Oseania Sangho Jo, melalui blog resmi Samsung, Senin (9/1).

Setidaknya saat ini dua ponsel Samsung, yaitu Galaxy Z Fold 4 dan Galaxy Flip 4 menggunakan bahan daur ulang berupa plastik dari jaring ikan yang tidak terpakai.

"Kami berencana menerapkannya ke lebih banyak produk," kata Jo.

Samsung belum menyebutkan lini ponsel mana lagi yang akan menggunakan bahan daur ulang, namun, mereka akan menggunakan teknologi berdaya rendah untuk produk ponsel, kulkas, mesin cuci, AC, televisi, monitor dan PC.

Sejumlah komponen pada ponsel akan dibuat menggunakan bahan daur ulang antara lain braket untuk tombol samping, braket antena dan bagian dalam tombol.

Samsung memiliki komitmen untuk mengurangi konsumsi energi

dengan menggunakan bahan daur ulang. Untuk wilayah Asia Tenggara, perusahaan asal Korea Selatan itu berkomitmen untuk menyamakan jumlah penggunaan listrik dengan energi terbarukan pada 2027.

Samsung juga menyediakan program untuk mengurangi limbah elektronik pada sejumlah negara, yaitu berupa Eco Box untuk memberikan ponsel lama untuk didaur ulang dan Eco Repair untuk perbaikan hanya pada suku cadang yang rusak.

Perusahaan-perusahaan smartphone yang besar memahami hal itu dan beberapa di antaranya malahan membuat program daur ulang. Dengan proses daur ulang itu, limbah smartphone bisa berkurang, tetapi perusahaan tetap bisa memproduksi barang baru.

Tapi bagaimana proses daur ulangnya itu sendiri? Berikut ini adalah beberapa prosesnya.

1. TAHAP AWAL

Perusahaan-perusahaan smartphone yang besar memahami hal itu dan beberapa di antaranya malahan membuat program daur ulang. Dengan proses daur ulang itu, limbah smartphone bisa berkurang, tetapi perusahaan tetap bisa

memproduksi barang baru.

Tapi kamu tidak tahu kan bagaimana proses daur ulangnya itu sendiri? Berikut ini adalah beberapa prosesnya.

2. BATEREI DIPISAHKAN

Smartphone yang sudah masuk pabrik akan disortir ulang kembali. Baterai smartphone tersebut akan dipisah dan dikirim ke pabrik daur ulang yang lain. Alasan pemisahan tersebut adalah baterai memiliki kandungan berbeda dari material smartphone dan itu perlu ditangani dengan cara khusus.

3. PEMISAHAN BAHAN LAIN

Bukan hanya baterai saja yang dipisah, tetapi begitu pula dengan material lainnya. Material logam dan plastik akan diusahakan dipisahkan dan dikelompokkan sendiri untuk memudahkan proses daur ulang. Itu karena dua bahan tersebut memiliki proses daur ulang yang cukup berbeda.

4. PROSES DIHANCURKAN

Masuk di proses ini, smartphone usangmu akan sepenuhnya dihancurkan oleh pabrik. Mereka

diparut, lalu dipanaskan dengan suhu lebih dari 1.000 derajat Celcius. Ini akan membuat sampel smartphone itu menjadi debu. Setelah itu, sampel tersebut akan melalui proses kimiawi.

5. BAHAN-BAHAN DILELEHKAN

Setelah semua proses tersebut, baru lah sampel tersebut dilelehkan. Pelelehan ini tujuannya adalah agar material tersebut bisa dibentuk ulang kembali sesuai dengan desain dari smartphone terbaru. Selain body, bagian lain yang bisa didaur ulang meliputi layar LCD, microphone, speaker, hingga sekrup.

Sebenarnya sebelum proses daur ulang, smartphone yang usang itu diperiksa kembali. Bagian-bagian smartphone yang sekiranya masih bagus akan digunakan kembali sebagai spare part jika sewaktu-waktu ada yang ingin memperbaikinya. Tentu saja spare part yang bagus ini dijual.

Dalam banyak kasus, perusahaan malahan akan menggunakan kembali smartphone lama yang masih bisa terpakai. Umumnya barang ini akan dilemparkan ke negara berkembang yang membutuhkan. Tapi untuk menjaga kerahasiaan dan privasi pengguna, data dalam smartphone akan dihapus terlebih dahulu sebelum dikirimkan (Ant)



8 DAMPAK BURUK KDRT BAGI ANAK

KEKERASAN Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi hal yang marak terjadi belakangan ini. Tindakan kekerasan ini contohnya baru saja dialami oleh Vena Melinda dan Lesti Kejora.

KDRT tak hanya berdampak bagi korban kekerasan, melainkan juga ke orang yang menyaksikannya, anak-anak.

Dilansir dari Verywellmind.com, Selasa (10/1/2023), KDRT dapat mengganggu psikologis anak.

Bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, serangan fisik, penganiayaan emosional, dan penganiayaan lain yang dialami pasti akan berdampak buruk pada keberlangsungan hidup mereka di masa mendatang. Simak dampak KDRT pada anak

1. KECEMASAN

Anak-anak cenderung selalu merasa gelisah jika mereka selalu dikelilingi oleh tindak pelecehan yang menimpa dari salah satu orang terdekatnya.

Anak-anak ini akan hidup dengan trauma untuk serangan fisik atau verbal berikutnya yang mungkin terjadi di kehidupan mereka.

Bagi anak-anak prasekolah yang menyaksikan tindak KDRT, mereka bisa saja secara tidak sadar memiliki kebiasaan seperti mengisap jempol, mengompol, menangis, dan merengek.

2. ANTISOSIAL

Berbeda dengan anak-anak yang belum memasuki dunia pendidikan, mereka yang telah memasuki usia sekolah dapat memiliki sifat anti-sosial dan mungkin dipenuhi dengan rasa bersalah atas pelecehan yang disaksikannya.

Umumnya anak-anak yang mendapat atau melihat secara langsung perlakuan kasar atau kekerasan dari anggota keluarga yang lebih tua, seperti ayah, ibu, paman, atau bibi dapat mengubah pola berpikirnya bahwa orang lain terutama dewasa akan selalu berbuat jahat kepadanya, sehingga anak menjadi kehilangan rasa percaya dan juga rasa aman untuk bersosialisasi dengan orang lain.

3. GANGGUAN TIDUR

Meski terhindar dari kekerasan fisik, trauma kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan perubahan yang serius pada perkembangan otak anak. Perubahan ini umumnya dapat menyebabkan gangguan tidur seperti perubahan pola waktu tidur hingga selalu mengalami mimpi buruk

4. SUSAH KONSENTRASI

KDRT dapat menyebabkan gangguan pasca trauma (Post-Traumatic Stress Disorder) pada anak. Mereka akan mengalami perubahan pada emosional, mereka akan cenderung lebih cepat marah, mudah

menangis, hingga sulit berkonsentrasi.

Anak-anak akan menjadi susah fokus dalam kesehariannya. Tak heran jika banyak anak korban KDRT yang mengalami penurunan prestasi di sekolahnya.

5. DEPRESI

Seorang anak yang memiliki kecemasan akibat tumbuh di dalam lingkungan yang tidak sehat dan penuh kekerasan, bisa bertumbuh menjadi orang dewasa yang mengidap depresi. Trauma yang ditimbulkan akibat menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga secara rutin membuat anak berisiko tinggi mengalami depresi, kesedihan, dan memicu gejala depresi lainnya hingga dewasa.

6. GANGGUAN KESEHATAN

Pada balita, KDRT memiliki kemungkinan tinggi untuk mengalami cedera fisik setelah tidak sengaja berada di tempat yang sama pada saat kejadian kekerasan berlangsung. Tak hanya itu, anak yang tinggal di lingkungan KDRT juga cenderung kurang diperhatikan oleh orang tua mereka, sehingga mereka memiliki pola makan yang tidak teratur. Kemudian ketika memasuki usia dewasa, mereka akan rentan terkena penyakit yang berbahaya seperti diabetes.

7. AGRESIF

Anak-anak cenderung mencontoh atau mengikuti perilaku yang biasa

dilakukan oleh orang terdekatnya. Inilah yang menjadi penyebab banyak remaja yang sering menyaksikan kejadian KDRT di rumahnya, mereka memiliki kemungkinan besar untuk meniru perbuatan tersebut di luar rumahnya.

8. GANGGUAN SOSIAL

Anak yang melihat langsung atau bahkan mengalami KDRT dalam bentuk kekerasan seksual dapat mengakibatkan gangguan pada seksualitasnya. Perlakuan yang diterima anak dapat membuatnya kesulitan untuk melakukan hubungan seksual saat ia dewasa karena terbayang perasaan negatif yang dia alami ketika kecil (Bisnis)



Cerca Harapan ... (dari hal 1)

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengakui sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi 1965. Adapun langkah ini dilakukan oleh pemerintah setelah menerima rekomendasi dari Tim Nonyudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka, Rabu (11/1/2023).

Pengakuan atas pembantaian massal 1965 itu pun disambut tangis haru oleh para penyintas 1965. Uchikowati Fauzia selaku Ketua paduan suara Dialita pun angkat suara. "Menangis. Ingat para korban yang sudah wafat," kata Uchi saat dihubungi, Rabu (11/1/2022). Dialita merupakan kelompok paduan suara yang anggotanya adalah para perempuan mantan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

Uchi sendirimerupakan penyintas tragedi berdarah tersebut. Ayahnya, DS Santosa, Bupati Cilacap periode 1958-1965, termasuk orang yang ditahan karena dituduh terlibat dalam gerakan G30S/PKI. Uchi mengatakan dia dan teman-temannya menangis saat mendengar pengakuan Jokowi atas tragedi 1965. Ia ingat kepada para korban 1965.

Dia juga bersyukur bahwa yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sebab, ini sesuai dengan amanat Keppres No 17 Tahun 2022. "Yang pertama saya bersyukur pada Tuhan, akhirnya yang kami tunggu itu datang yaitu penyesalan atas terjadi peristiwa 1965/1966 sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Keppres Nomor 17 tahun 2022 tentang pemulihan untuk korban dan keluarga, kami merasa penting tetap mengawal sampai tuntas," tuturnya.

Dia mengatakan bahwa teman-temannya di Dialita tetap merawat harapan. Inilah yang menjadi sumber kekuatan para penyintas 1965 ini. "Kami selalu bilang kita harus punya harapan. Sekalipun penguasa atau siapa pun membuat kita tidak punya harapan. Kita harus lawan. Harapan itu ada dalam diri sendiri. Harapan tidak akan hilang jika kita tetap menumbuhkan merawat harapan. Itu sumber kekuatan kami," ujarnya.

Terpisah, Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengapresiasi langkah dan sikap pemerintahan Jokowi tersebut. Hal itu menjadi sebuah langkah maju negara dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat pada masa lalu.

"Saya mengapresiasi pidato presiden dan sikap negara yang diambil terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh rim PPHAM dan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat," kata Beka Ulung Hapsara.

Sikap ini juga menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia sebagai sebuah negara. Pasalnya, menurut Beka, ini adalah pertama kalinya negara mengakui telah melakukan sebuah pelanggaran HAM berat. "Setahu saya ini memang yang pertama kali. Ada pengakuan negara terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan negara dan

menyatakan penyesalannya," ujarnya.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Gus Dur memang sempat menyampaikan permintaan maaf terkait peristiwa 1965. "Tapi saat itu statusnya belum dinyatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM," ujarnya.

Sikap ini menurut dia juga memberikan arti yang sangat besar, terutama bagi korban-korban dari pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Dengan negara mengakui kesalahan yang ada, maka pemulihan hak-hak korban juga harus segera dilakukan. Selain itu, sikap ini juga menjadi pondasi yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian berikutnya, baik yudisial maupun nonyudisial.

"Tinggal menunggu langkah-langkah nyata pemulihan korban dan jaminan ketidakberulangan oleh negara seperti yang diperintahkan Presiden kepada Pak Mahfud," ujar Beka Ulung Hapsara.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan bahwa pengakuan Presiden RI Joko Widodo atas terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu "tidak ada artinya" jika tak diikuti pertanggungjawaban hukum.

Usman dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1/2023), menyatakan, meski menghargai sikap Presiden Joko Widodo dalam mengakui terjadinya pelanggaran HAM sejak tahun 1960-an di Indonesia, "Pernyataan ini sudah lama tertunda mengingit penderitaan para korban yang dibiarkan dalam kegelapan tanpa keadilan, kebenaran, dan pemulihan selama beberapa dekade."

"Namun, pengakuan belaka tanpa upaya mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu hanya akan menambah garam pada luka korban dan keluarganya. Sederhananya, pernyataan Presiden tersebut tidak besar artinya tanpa adanya akuntabilitas."

Lebih lanjut, Usman menyorot pernyataan presiden yang seakan memilah peristiwa pelanggaran HAM berat. Ia menyebut peristiwa-peristiwa berdarah yang tidak disebutkan Jokowi dalam pernyataannya, antara lain operasi militer di Timor Timur (kini Timor Leste), Peristiwa 27 Juli 1996, serta pembunuhan Munir Said Thalib pada 2004.

Usman menegaskan bahwa absennya kasus-kasus lain dari pernyataan Jokowi merupakan "penghinaan" bagi banyak korban. Ia pun menyorot para terdakwa pelaku pelanggaran HAM yang dibebaskan.

Usman mengkritik komentar Mahfud MD tentang pembebasan terdakwa empat kasus pelanggaran HAM karena bukti tidak cukup. Ia menuduh otoritas kejaksaan Indonesia tidak serius mencari bukti.

Amnesty Internasional Indonesia mengingatkan kepada pemerintah Indonesia, "bahwa mengakhiri impunitas melalui penuntutan dan penghukuman pelaku adalah satu-satunya cara untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi

manusia dan memberikan kebenaran dan keadilan sejati kepada para korban dan keluarganya. Pelaku harus dihadapkan pada proses hukum, jangan dibiarkan, apalagi sampai diberikan kedudukan dalam lembaga pemerintahan."

Mencuat Isu Komunisme

Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan bahwa penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu itu bukan untuk menghidupkan lagi komunisme. "Kedua isu yang dulu misalnya masalah peristiwa '65 ada yang menuding itu untuk menghidupkan lagi komunisme dan sebagainya itu tidak benar. Karena berdasarkan hasil tim ini justru yang harus disantuni bukan hanya korban-korban dari pihak PKI tapi juga direkomendasikan korban kejahatan yang muncul di saat itu termasuk para ulama dan keturunannya," tutur Mahfud saat menyampaikan laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) Berat Masa Lalu ke Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

Mahfud juga menepis bahwa pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu itu untuk mendiskreditkan Islam. Mahfud menjelaskan, korban-korban yang haknya dipulihkan justru banyak dari kalangan ulama.

"Tidak benar juga ini mau memberi angin kepada lawan Islam karena dukun santet di Banyuwangi. Itu yang akan diselesaikan dan disantuni oleh atas rekomendasi PPHAM ini semuanya ulama. Di Aceh itu semuanya Islam. Kenapa harus dikatakan bahwa ini untuk mendiskreditkan Islam untuk memberi angin kepada PKI itu sama sekali tidak benar karena soal PKI itu sudah ada Tap MPR-nya," kata dia.

"Kami sudah sampaikan itu semua pada Bapak Presiden rekomendasi sosial politik ekonomi termasuk pendidikan HAM kepada keluarga besar TNI dan ABRI juga sudah dan Polri juga sudah disampaikan," lanjut Mahfud.

Mahfud memaparkan, korban pelanggaran HAM berat yang haknya dipulihkan salah satunya korban peristiwa pembunuhan dukun santet hingga peristiwa 1965-1966. Mahfud mengungkapkan, mereka yang menjadi korban dari peristiwa tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk umat Islam dan tentara.

"Di Aceh itu ada tiga tadi disebut. Ini islam semua. Kemudian dukun santet. dukun santet itu ulama semua 142 jadi korban dan keluarganya ya sampai sekarang masih menderita sehingga harus kita turun tangan ya kan? Kemudian kasus '65 itu bukan kasus PKI. Kasus '65 itu korbannya ada yang PKI, ada yang umat, ada yang tentara juga. Semua itu akan diberi santunan, rehabilitasi," papar Mahfud.

Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mencermati tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terkait pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam kurun waktu sebelum hingga

sesudah tahun 2000 di Indonesia. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik sikap Presiden Jokowi terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu

"Menyambut baik sikap Presiden atas adanya pengakuan terhadap 12 peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM," tulis dia dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1/2023).

Menurutnya, Pengakuan tersebut memperlihatkan adanya komitmen pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearer), pada pemulihan hak korban, dalam rangka untuk memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu," jelasnya.

Selain itu, Atnike dan pihaknya juga mendukung jaminan ketidakberulangan peristiwa pelanggaran HAM yang Berat, dengan membangun pemajuan dan penegakan HAM yang efektif. "Di antaranya dengan mendorong ratifikasi semua instrumen HAM Internasional, perubahan kebijakan di berbagai sektor dan tatanan kelembagaan pada institusi negara, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta aparat sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan HAM," terangnya. (wid,rls,kum, tmp/dya)

JENIS-JENIS PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

Menurut Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000, ada dua jenis pelanggaran HAM berat yang diakui dan diatur di Indonesia, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut penjelasannya:

- Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.
- Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

DASAR HUKUM PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM berat adalah segala bentuk tindak pelanggaran HAM berupa pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination). (Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999)

2. Penanganan kasus pelanggaran HAM berat juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Jokowi Serious Dukung Yusril Nyapres, Diminta Cari 'Kendaraan'

JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap memberikan dukungan apabila Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Kalau menyimak apa yang disampaikan Prof Yusril tadi dengan pengalaman beliau yang sangat panjang, saya mendukung lho, kalau Prof Yusril pada 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden," kata Jokowi saat menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai PBB di Jakarta, Rabu (1/1/2023).

Jokowi menegaskan bahwa pernyataannya itu serius. Namun sekarang para kader PBB dihadapkan pada tugas yang tidak mudah, yakni mencari kendaraan bagi Yusril mengingat undang-undang mengharuskan ambang batas 20 persen suara untuk pengajuan calon presiden. "Iya dong, ya tugasnya di situ. Begitu dapat kendaraan, saya dukung. Serius," katanya.

Lagi pula Jokowi masih ingat betul bagaimana PBB cukup konsisten menjadi salah satu partai pendukung dalam karier politiknya, baik semasa pencalonan Wali Kota Solo maupun pencalonan Presiden RI. "Saya saat wali kota, salah satu partai yang mendukung saya saat itu adalah PBB, saat presiden juga PBB. Jadi kalau saya dukung gantian, enggak ada salahnya," ujar Jokowi melengkapi.

Mengawali sambutannya, Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada PBB yang sudah lolos menjadi salah satu partai peserta Pemilu 2024. Jokowi berterima kasih atas komitmen partai politik itu dalam menjaga persatuan bangsa. "Tadi sudah disampaikan Prof Yusril, PBB identik sebagai partai Islam, tetapi kader-kader PBB berjiwa nasionalis. Terima kasih keislaman dan keindonesiaan telah menjadi napas PBB dalam berpartai," ujarnya.

Sebagai informasi, PBB pada Pemilu Legislatif 2019 hanya mendapatkan suara sebesar 0,79 persen sehingga mereka masih membutuhkan setidaknya 19,21 persen lagi dari partai lain untuk bisa mengajukan calon presiden pada Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berterima kasih atas dukungan Presiden Joko Widodo kepadanya bila ia maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada 2024 mendatang. "Saya terima kasihlah kepada Pak Jokowi mendukung saya jadi calon presiden tahun 2024, tapi kata beliau harus dapat dukungan 20 persen," kata Yusril se usai pembukaan Rakornas PBB di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Yusril pun bercerita bahwa pada tahun 1999 lalu ia menjadi salah satu calon presiden yang berkontestasi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain Yusril, nama lain yang dinominasikan ketika itu adalah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Yusril memutuskan mengundurkan diri dari pencalonan hingga akhirnya Gus Dur dipilih oleh MPR sebagai presiden menggantikan BJ Habibie. Dua tahun berselang, Gus Dur dimakzulkan lalu digantikan oleh wakilnya, Megawati. "Duanya kan sudah menjadi presiden, Gus Dur sudah, Bu Mega sudah, tinggal saya yang belum. Siapa tahu saya yang jadi presiden nanti," kata Yusril dengan nada bercanda.

Dukung Proporsional Tertutup

Di sisi lain, Partai Bulan Bintang (PBB) menyinggung terkait polemik sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyebut, partainya mengambil sikap untuk menghendaki sistem proporsional tertutup, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Lalu ada lagi wacana saat ini, apakah Pemilu dengan sistem terbuka atau tertutup. PBB sebenarnya menghendaki Pemilu dengan sistem tertutup, barangkali cuma tinggal PDIP dan PBB yang menghendaki sistem itu."

Untuk diketahui, sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) saja di surat suara mereka, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif (pileg).

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan alasan partainya untuk mendukung sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024 mendatang. "Mengapa kita berpikir seperti itu, oleh karena demokrasi kita telah mengalami pergeseran yang luar biasa dari kekuatan rakyat menjadi kekuatan uang, kekuatan modal," jelasnya.

"Orang tidak perlu dikader, didik di partai dan tidak perlu harus berjenjang dari bawah dalam kepengurusan, tiba-tiba karena punya uang, populer, direkrut jadi caleg dan terpilih akhirnya jadi anggota DPR yang jauh dari harapan kita."

Ditambah, lanjut dia, pekerjaan anggota DPR saat ini juga tidak seberapa dan jauh berbeda dengan masa lalu. Dia pun kemudian menyinggung ketika dirinya menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau MenkumHAM saat era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Yusril bercerita, dirinya saat itu dipaksa untuk membentuk dan mengesahkan lebih dari 100 undang-



undang (UU). "Saya ingat betul saat jadi Menteri Kehakiman dan HAM di bawah Presiden Megawati, saat itu dipaksa menyelesaikan 100 lebih UU dalam jangka waktu 2 tahun dan sebagian besar UU itu masih berlaku sampai sekarang," jelasnya.

PBB sendiri tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada Pemilu 2019. Saat itu, PBB mengantongi 1.099.848 suara atau setara 0,79 persen. Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu merupakan salah satu partai politik yang mengusung ideologi Pancasila serta Islamisme dan Nasionalisme di Indonesia.

PBB sudah mengikuti lima kali pemilu sejak pertama kali berdiri pada 1998. Namun, partai tersebut terakhir kali lolos ke Parlemen pada Pemilu 2004. Adapun hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024. Ada lima pemilihan yang akan diselenggarakan yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Tahapan pemilu sendiri sudah dimulai sejak pertengahan Juni 2022 dan hingga kini terus berjalan. (wid,ist,rls/dya)

JEJAK PBB DALAM PEMILU

DPRD PROVINSI

Pemilu	Perolehan Kursi	Jumlah Provinsi	Provinsi Juara	Keterangan
2014	16	10	tidak ada	
2019	▼ 7	▼ 5	tidak ada	Hanya mampu meloloskan wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Kehilangan perwakilan di DPRD Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah

DPR RI

Pemilu	Total kursi	Total pemilihan	Persentase	Hasil	Urutan
1999	13 / 462	2.049.708	1,94%	Partai baru	6
2004	11 / 550	2.970.487	2,62%	▼ 2 kursi	8
2009	0 / 560	1.864.752	1,79%	▼ 11 kursi	10
2014	0 / 560	1.825.750	1,46%	— 0 kursi	11
2019	0 / 575	1.099.848	0,79%	— 0 kursi	14